



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona virus Disease (COVID-19)* Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah, serta memperhatikan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* di Kabupaten Klaten, dengan ini memberikan instruksi Kepada:

1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Klaten;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. Para Pimpinan BUMN di Kabupaten Klaten;
4. Para Pimpinan BUMD di Kabupaten Klaten;
5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Klaten;
6. Camat;
7. Kepala Desa /Lurah;
8. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
9. Seluruh komponen masyarakat

Untuk :

KESATU

: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 di Kabupaten Klaten dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1. esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan pengaturan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan protokol kesehatan secara ketat serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas guna tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan;
 3. kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 4. untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh

persen); dan

5. untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, angkringan, dan lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (dine-in);
- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan poin c.3 dan d;
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- h. kegiatan sosial keagamaan yang menimbulkan kerumunan ditiadakan;
- i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, lapangan dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- j. kegiatan/event seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditiadakan;
- k. sanggar, lokasi/tempat pementasan seni, budaya, kegiatan sosial dan sarana olahraga yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional, taksi online dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pelaksanaan hajatan wajib menerapkan protokol

kesehatan secara ketat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dilarang mengadakan acara hajatan selain ijab qabul/akad nikah;
 2. ijab qabul/akad nikah hanya diizinkan dengan dihadiri 20 (dua puluh) orang dari kedua pihak;
 3. makanan dan minuman disajikan dalam kardus/box dan dibawa pulang;
 4. tamu/keluarga dari luar kota harus menyertakan hasil negatif tes antigen/PCR 1x24 jam dan diserahkan pada Satgas Tingkat Rukun Tetangga;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
 4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- o. dilakukan pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi mobilitas masyarakat;
- p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- q. setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dilarang; dan
- r. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

KEDUA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan >4 (lebih dari empat) jam;
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
 3. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 4. menyosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau

- menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
1. *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate sampai <5% (lima persen), *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat.
 2. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 3. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai

dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KETIGA : Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, kegiatan sosial keagamaan, fasilitas umum, kegiatan/event seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan, sanggar, lokasi/tempat pementasan seni, budaya, kegiatan sosial dan sarana olahraga, transportasi umum dan pelaksanaan hajatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c angka 4, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi berupa:

- a. Pembubaran;
- b. Penutupan;
- c. Penyegehan dan/atau
- d. tindakan lain yang dianggap perlu di wilayah masing-masing.

KEEMPAT : Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular dapat dikenakan sanksi berdasarkan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
- d. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan sebagai Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Klaten.

KELIMA : Kepala Kepolisian Resor Klaten, Komandan Komando Distrik Militer 0723 Klaten, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Klaten, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Klaten, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Pimpinan BUMN, Pimpinan BUMD, Camat, Kepala Desa, Lurah, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Klaten agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KEENAM : Pada saat ditetapkannya Instruksi Bupati ini, maka:

- a. Instruksi Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Klaten; dan
- b. Surat Edaran Bupati Nomor 443.5/136 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Klaten;

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Instruksi Bupati ini.

KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 3 Juli 2021

